

Renvoi terhadap akta notaris tanpa pengesahan para pihak dan implikasi hukum terhadap aktanya dan para pihak (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 749/PID.B/2016/PN.Cbi tanggal 3 Mei 2017) = Renvoi to notarial deeds without parties legitimation and its implication to the deeds and the parties (case study of The County Court of Cibinong Verdict Number 749/PID.B/2016/PN.Cbi, dated 3rd May 2017) / Nuneng Marlina

Nuneng Marlina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476592&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salinanakta dikeluarkan berdasarkan minuta akta, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang cacat hukum dan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Jika tidak memenuhi syarat formal dan materiil dinyatakan tidak berlaku tetapi diajukan pembatalan melalui proses hukum yang ada. Adapun tanggungjawab yang dapat dituntut terhadap Notaris oleh pihak yang dirugikan akibat akta yang mengandung cacat hukum adalah melalui proses pengadilan, dengan menuntut pertanggungjawaban dari Notaris berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban administrasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelitian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris yang mengandung cacat hukum karena isi maupun prosedurnya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Kata kunci : Notaris; Akta Autentik; Kewenangan; Tanggung Jawab.

<hr>

ABSTRACT

The provisions of Article 16 paragraph 1 letter d of Law Notary No. 2 of 2014 states that a copy of deed issued based on the minutes deed, Article 1 point 9 of Law Notary No. 2 of 2014 concerning copy of deed is a verbatim copies of all deeds content at the bottom of the certified deed copy states the phrase is given as the same copy sound . The purpose of the research was to address issue of legal consequence induced by invalid notarial deed and responsibility of the notary public over the invalid notarial deed. However, if it does not comply with formal and material requirement so it is not valid, a cancellation may be filed through existing legal process. Claim against notary public by party losing due to the invalid deed may be filed to court, in form of criminal, civil and administration responsibilities. It was juridical normative research, which emphasized literary study and regulation of law. The result of the research gained that the defendant had

violated Law of Notary and Notary Code of Ethics and indicated that legal consequence induced by invalid notarial deed due to its content or procedure have not complied with laws, either Law of Notary or Civil Law Code lead to the deed to be under hand deed, cancellable or null and void. Key words Notary Authentic Deeds Authority Responsibility.